



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBACHRAN HARDI MULYONO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **18219**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 910.990.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1190 m2/72 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 305 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 6.100.000
3. Tanah Seluas 513 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 61.560.000
4. Tanah Seluas 523 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 290 m2 di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 155.730.000
6. Tanah Seluas 1985 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 317.600.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 771.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 291.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV SE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 250.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.320.025
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.018.310.025
III. HUTANG	Rp.	685.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.333.310.025

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.